

LKIP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN
TAHUN 2022**



**DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN
HEWAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN CIANJUR**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim Assalamu'alaikum wr. wb.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Tahun 2022 merupakan penyampaian akuntabilitas kinerja pelaksanaan program kegiatan selama Tahun 2022 dalam rangka perwujudan visi Kabupaten Cianjur yaitu "**CIANJUR MANJUR (MANDIRI, MAJU, RELIGIUS) BERAKHLAK MULIA**".

LKIP ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Tahun 2022 dan menggambarkan capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tahun 2022. Selanjutnya pencapaian target kinerja utama tersebut akan menggambarkan progres pembangunan Kabupaten Cianjur yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. LKIP Tahun 2022 ini, menyajikan sasaran strategis, indikator kinerja, target, dan realisasi kinerja berikut efisiensi penggunaan anggaran.

Alhamdulillah, secara umum, rata-rata target kinerja tercapai 100% walaupun masih dalam masa pemulihan pasca pandemi Covid-19. Hal ini memperlihatkan bahwa kondisi yang ingin dicapai melalui penetapan sasaran strategis secara umum dapat terpenuhi sesuai harapan.

Semoga penyusunan LKIP Tahun 2022 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan capaian kinerja pembangunan Kabupaten Cianjur khususnya bidang Perikanan dan Peternakan serta Kesehatan Hewan di masa mendatang serta bermanfaat bagi instansi lain.

Terima kasih.
Walaikumsalam wr. wb.

Cianjur, Februari 2023
Kepala Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan
dan Perikanan Kabupaten Cianjur



Aniq Rifa'i Azhari, S.Sos, M.Si



IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah Akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur ini telah selesai disusun. LKIP ini menyajikan Capaian Kinerja dari Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur selama Tahun Anggaran 2022 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Di samping itu, tujuan pelaporan ini dalam rangka mengetahui sejauh mana Program dan Kegiatan dapat dicapai secara terukur menggunakan indikator yang realistis dan diperkirakan dapat dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bernegara, dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur disusun berdasarkan Hasil Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2022. LKIP ini merupakan perwujudan pertanggung-jawaban dalam melaksanakan Misi Kabupaten Cianjur, sekaligus menggambarkan keberhasilan seluruh Lembaga Pemerintahan, dukungan serta partisipasi masyarakat secara umum.

Kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang ada pada Rencana Strategis Dinas. Program dan Kegiatan ditujukan untuk peningkatan Pelayanan dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tersebut secara keseluruhan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hasil Evaluasi Kinerja bahwa pelaksanaan Program dan Kegiatan dapat dikategorikan berhasil dengan capaian rata-rata 90,68%. Keberhasilan tersebut tidak menutup kemungkinan masih ada kekurangan, hambatan dan kendala dalam melaksanakan Program dan Kegiatan lainnya. Hal ini disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana, stakeholder yang masih terbatas serta anggaran yang tersedia, sehingga merupakan tantangan bagi Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur untuk lebih meningkatkan Kinerja di tahun yang akan datang

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| DAFTAR TABEL..... | iv |
| DAFTAR GAMBAR..... | v |
| | |
| EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 2 |
| 1.2 Maksud dan Tujuan..... | 3 |
| 1.3 Gambaran Umum Organisasi..... | 3 |
| 1.4 Kedudukan, Tugas dan Fungsi..... | 5 |
| 1.5 Isu Strategis..... | 6 |
| | |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 9 |
| 2.1 Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Cianjur 2021-2026..... | 10 |
| 2.2 Cascading Kinerja..... | 15 |
| 2.3 Peta Proses Bisnis..... | 16 |
| 2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022..... | 17 |
| 2.5 Rencana Anggaran Tahun 2022..... | 21 |
| | |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 23 |
| 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.... | 23 |
| 3.2 Realisasi Anggaran..... | 28 |
| 3.3 Analisis Efisiensi Anggaran..... | 29 |
| 3.4 Penghargaan/Prestasi Tahun 2022..... | 30 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | 32 |
| LAMPIRAN | 35 |

DAFTAR TABEL

| | |
|-------------------|----|
| TABEL 2.1..... | 13 |
| TABEL 2.1.1 | 14 |
| TABEL 2.4 | 19 |
| TABEL 2.5 | 21 |
| TABEL 3.1 | 25 |
| TABEL 3.3 | 28 |
| TABEL 3.3.1 | 29 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|----------------------------|-----------|
| GAMBAR 1.3..... | 4 |
| GAMBAR 1.4..... | 6 |
| GAMBAR 2.1..... | 12 |
| GAMBAR 2.2.1..... | 15 |
| GAMBAR 2.2.1.2..... | 15 |
| GAMBAR 2.3.1..... | 16 |
| GAMBAR 2.3.2..... | 17 |
| GAMBAR 3.1..... | 26 |
| GAMBAR 3.2..... | 26 |
| GAMBAR 3.3..... | 27 |
| GAMBAR 3.4.1..... | 30 |

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 mengamanatkan agar instansi pemerintah melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun rencana yang didukung oleh pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) baik nasional maupun daerah. Kewajiban ini merupakan salah satu bukti tertulis akan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Pada perkembangannya, amanat ini dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang memperluas tujuan pelaporan sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalamnya, akuntabilitas kinerja menjadi bagian dari delapan area perubahan yang menjadi fokus dari reformasi birokrasi. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditetapkan dan mempertegas urgensi pertanggungjawaban pencapaian kinerja terutama sebagai penggambaran upaya dalam mewujudkan visi dan misi Bupati. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Tahun 2022 merupakan upaya dalam memenuhi amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas. Namun tidak hanya itu, pelaporan ini juga merupakan media penyampaian informasi pencapaian kinerja sebagai bentuk pertanggung jawaban Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan kepada para stakeholder. Sehingga, sasaran dan target kinerja

yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dapat dinyatakan berhasil atau tidak berhasil dicapai. Pernyataan tersebut bermanfaat bagi stakeholder untuk melihat posisi pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LKIP Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Tahun 2022 dimaksudkan sebagai penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2022. Adapun tujuan dari penyusunan LKIP Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Tahun 2022 adalah sebagai penyajian ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Tahun 2022, penggambaran upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, efisiensi pemanfaatan anggaran, serta sebagai evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa datang.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan sebagaimana Peraturan Bupati Cianjur Nomor 91 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi, serta tata kerja unit organisasi di lingkungan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan. merupakan struktur yang telah dikondisikan sesuai amanat Presiden tentang penyederhanaan birokrasi.

Secara total, jumlah bidang yaitu sebanyak 4 bidang yakni Bidang Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan dan masyarakat Veteriner, Bidang Perikanan Budidaya dan Bidang Perikanan Tangkap. Adapun penyesuaian dilakukan terutama terhadap Eselon 4

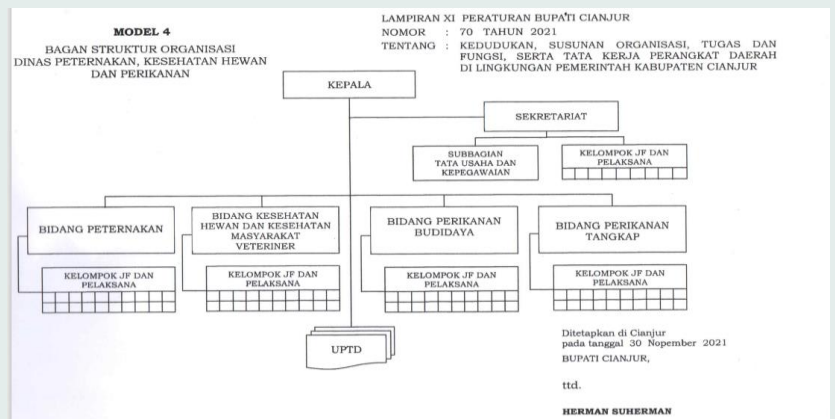
yang semula Jabatan Struktural menjadi Jabatan Fungsional (JF) serta terdapat 7 UPTD

Secara lebih jelas, susunan Organisasi Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut:

Susunan organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - b.1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b.2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- c. Bidang Peternakan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- d. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- e. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- f. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- g. UPTD

Gambar 1.3
Struktur Organisasi DPKHP



1.4 KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan, dan urusan bidang kelautan dan perikanan.

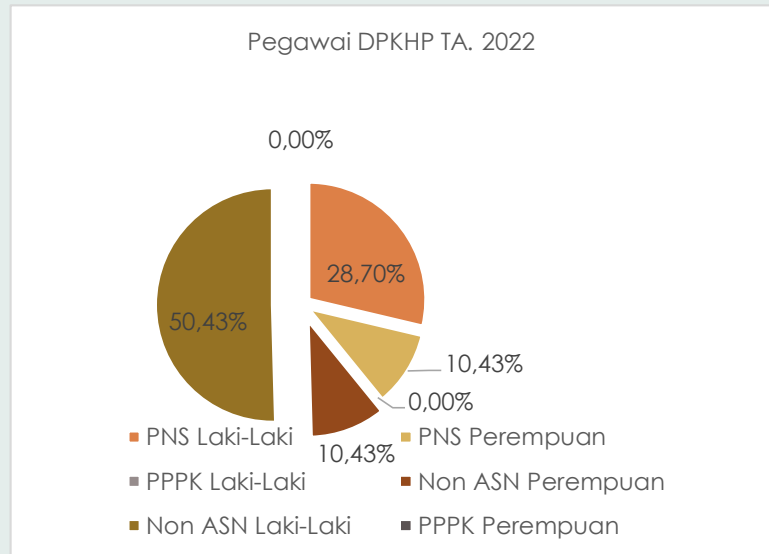
Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan, dan urusan bidang kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan, dan urusan bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan data dari Bagian tata Usaha dan Kepegawaian DPKHP per 31 Desember 2022, pegawai Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur sejumlah 123 orang terdiri dari pegawai laki-laki sebanyak 91, Pegawai Perempuan sebanyak 32 orang Dengan jumlah PNS sebanyak 53 orang yang terdiri dari perempuan berjumlah 12 orang sedangkan laki-laki berjumlah 33

orang, sedangkan untuk PPPK sebanyak 0 orang dan Non ASN sebanyak 70 orang yang terdiri dari perempuan berjumlah 12 orang dan laki-laki berjumlah 58 orang.

Gambar 1.4
Komposisi Pegawai PNS dan Non PNS DPKHP



1.5 ISU STRATEGIS

Dalam penentuan isu-isu strategis Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur dapat diambil sesuai dengan Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur didalam identifikasi permasalahan yang disebut sebelum dan yang juga tertuang dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 91 Tahun 2021 tentang Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur, yang bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan, dan urusan bidang kelautan dan perikanan

Sebagai langkah tindak lanjut dalam pelaksanaan Strategi kebijakan secara teknis Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan berusaha melakukan analisa terhadap faktor faktor kunci keberhasilan (key success factor). Berdasarkan identifikasi masalah, telaahan visi dan misi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), maka dapat diidentifikasi Permasalahan mendasar yang dihadapi bidang urusan perikanan yaitu masih rendahnya produksi dan produktivitas perikanan baik itu dari perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Produksi perikanan budidaya di Kabupaten Cianjur saat ini masih didominasi oleh hasil dari perikanan budidaya di kolam jaring apung. Sebanyak 80 % produksi perikanan budidaya merupakan hasil dari perikanan budidaya di kolam jaring apung. Hal ini akan menjadi masalah ketika kebijakan pengelolaan budidaya jaring apung dikurangi atau bahkan dihapuskan. Mahalnya harga pakan menjadi salah satu kendala ketika budidaya perikanan dilakukan secara intensif. Pengembangan budidaya ikan di kolam air payau dan tambak saat ini belum banyak dikembangkan di masyarakat dikarenakan pengembangan sarana infrastruktur untuk perikanan budidaya air payau cukup mahal dan membutuhkan penguasaan teknologi yang cukup sulit. Untuk perikanan tangkap saat ini produktivitasnya masih rendah. Factor cuaca, Sarana dan prasarana penangkapan ikan yang dimiliki oleh nelayan Kabupaten Cianjur masih dibawah 5 GT mengakibatkan hasil tangkapan ikan masih terbatas. Penataan infrastruktur sektor laut di Kabupaten Cianjur saat ini masih kurang memadai, kolam labuh yang terletak di Pelabuhan Jayanti saat ini masih kurang optimal dalam menampung keberadaan kapal nelayan, selain itu keberadaan bangunan pemecah gelombang (Breakwater) masih harus diperluas sehingga bisa membantu para nelayan dalam melakukan usaha penangkapan hasil ikan di laut.. Selain itu perlindungan kepada nelayan masih

harus terus dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada nelayan dan keluarganya.

Sedangkan untuk urusan peternakan. Rendahnya produksi dan produktivitas sektor peternakan rakyat yang ada di kabupaten Cianjur tidak terlepas dari beberapa permasalahan yang selalu muncul dan dialami oleh peternak. Pemilihan benih dan bibit ternak menjadi salah satu faktor rendahnya produksi, selain itu masih munculnya beberapa penyakit ternak yang ada dimasyarakat, jumlah kepemilikan ternak yang rendah, serta rendahnya penguasaan teknologi tepat guna yang dimiliki oleh peternak menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya produksi dan produktivitas sektor peternakan di Kabupaten Cianjur.

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

II.I RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR 2021-2026

Perencanaan adalah serangkaian proses untuk menentukan tujuan organisasi yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menentukan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah sejalan dengan tuntutan reformasi, dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan harus lebih transparan dan akuntabel. Sedangkan, pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu upaya perubahan kearah yang lebih baik, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dilakukan secara berkelanjutan.

Tahun 2022 merupakan tahun 2 periode Kepala Daerah Kabupaten Cianjur yang tentunya Kepala Daerah terpilih menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021- 2026. RPJMD periode ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah periode 2021- 2026.

Adapun Visi pembangunan daerah Kabupaten Cianjur untuk periode 2021-2026 adalah **“CIANJUR MANJUR (MANDIRI, MAJU, RELIGIUS) BERAKHLAK MULIA”** Perumusan visi dan misi pembangunan merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen perencanaan sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi dan misi pembangunan Kabupaten Cianjur dibangun untuk menunjukkan cita-cita bersama masyarakat Kabupaten Cianjur dan para stakeholder pembangunan yang ada di Kabupaten Cianjur.

Dasar dari perumusan visi ini adalah masih banyaknya permasalahan pembangunan yang masih harus ditangani di Kabupaten Cianjur. Salah satunya adalah Indeks pembangunan manusia (IPM)/

human development index yang selama ini dijadikan parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan sebuah daerah, posisinya sampai dengan tahun 2022 baru mencapai 65,94 poin. Selain itu, sektor pendidikan, sektor kesehatan serta kemampuan daya beli (purchasing power) masyarakat yang masih rendah dan perlu ditingkatkan. Sektor infrastruktur juga harus menjadi fokus perhatian Kabupaten Cianjur hari ini dan ke depan, dimana infrastruktur yang lengkap dan berkualitas akan memberikan stimulus atas aktivitas masyarakat yang kreatif dan berkualitas baik dari sisi jasmani maupun rohani.

Masa sekarang disebut dengan masa kehidupan digital. Era Industri 4.0 yang sering diidentikkan dengan era kelimpahan data - big data, era internet of things, era "artificial intelligence", robotisasi, tentu dengan segala implikasinya terhadap aspek kehidupan merupakan hal yang harus dipertimbangkan dalam membangun Cianjur ke depan. Pada saat yang bersamaan pada tahun dokumen ini dibuat, masih pada situasi pemulihan dampak Pandemi Covid-19, sehingga menjadi tantangan lain bagi masyarakat Kabupaten Cianjur dan dituntut untuk bisa melakukan adaptasi kehidupan baru (AKB) selain itu di akhir tahun 2022 Kabupaten Cianjur mengalami bencana alam Gempa Bumi yang tentu saja sangat berdampak pada semua sector.

Dari visi yang telah dirumuskan, perlu dibangun komitmen yang menggambarkan upaya-upaya yang harus diselenggarakan. Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Cianjur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, bertakwa dan berakhlak mulia menyambut era society 5.0;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal, mandiri dan berdaya saing tinggi sesuai dengan tuntutan era industri 4.0;

3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan serta mendukung peningkatan dan pemerataan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi ;
4. Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam untuk menjamin keseimbangan alam dan kelangsungan lingkungan hidup;
5. Pemantapan reformasi dan transformasi birokrasi

Gambar 2.1

Keterkaitan Visi, Misi RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra DPKHP

| Visi CIANJIUR MANIUR (MANDIRI, MAJU, RELIGIUS) BERAKHLAK MULIA | |
|--|--|
| Misi Ke 2 2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal, mandiri dan berdaya saing tinggi sesuai dengan tuntutan era industri 4.0 | Misi ke 4 4. Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam untuk menjamin keseimbangan alam dan kelangsungan lingkungan hidup |
| Tujuan RPJMD Meningkatnya perekonomian daerah | Tujuan RPJMD Terwujudnya pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam yang berkelanjutan |
| Sasaran Meningkatnya PDRB sektor pertanian | Sasaran Terpenuhinya kebutuhan lahan pertanian untuk masyarakat secara berkelanjutan |
| Strategi | Strategi |
| Arah Kebijakan | Arah Kebijakan |
| Tujuan Meningkatkan Ketersediaan Produksi Hewani | Tujuan Terwujudnya pengelolaan sumber daya perikanan dan peternakan yang berkelanjutan |
| Sasaran Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan dan Perikanan | Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Lahan untuk perikanan dan peternakan |

RPJMD

RFNSTR

Sumber : Olahan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk mencapai hal tersebut, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur, menetapkan tujuan yang ingin dicapai yaitu **“Meningkatkan Ketersediaan Produksi Hewani”**. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, terdapat dua sasaran yang akan dicapai selama kurun waktu 2021-2026, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan dan Perikanan;
2. Meningkatnya Pengelolaan Lahan untuk perikanan dan peternakan

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan melaksanakan 7 Program Belanja Langsung Urusan yaitu ;

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
4. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
5. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
7. Program Penyuluhan Pertanian

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, indikator sasaran dan Program yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan disajikan pada gambar 2:

Tabel 2.1

Keterkaitan Sasaran RPJMD, Tujuan, Sasaran Renstra Dinas Peternakan kesehatan hewan dan perikanan

| | | | |
|--------------------------------|--|---|--|
| SASARAN RPJMD | 1. Meningkatnya PDRB sektor pertanian | | 2. Terpenuhinya kebutuhan lahan pertanian untuk masyarakat secara berkelanjutan |
| TUJUAN | 1. Meningkatkan Ketersediaan dan Jaminan Mutu Pangan Hewani yang cukup dan berkualitas | | 2. Terwujudnya pengelolaan sumber daya perikanan dan peternakan yang berkelanjutan |
| SASARAN RENSTRA | 1.1. Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan dan Perikanan | | 2. 1. Meningkatnya Pengelolaan Lahan untuk perikanan dan peternakan |
| INDIKATOR SASARAN (IKU) | a. Jumlah Produksi Hasil Perikanan (Ton) | b. Jumlah Produksi Hasil Peternakan (Ton) | a. Jumlah Pemanfaatan Lahan Untuk Perikanan (Ha) |

Sumber : Olahan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

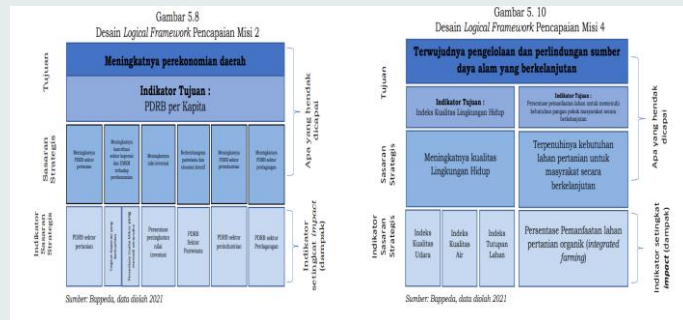
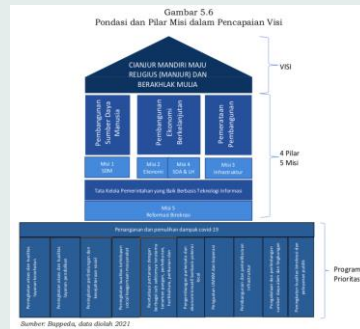
Tabel 2.1.1
Sasaran Strategis Jangka Menengah

| Tujuan/K Tujuan dan Target | | | Sasaran/K sasaran dan Target | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Misi RPJMD | Tujuan PD | Indikator Kinerja Tujuan PD | Sasaran PD | Indikator Kinerja sasaran PD | Kondisi Awal 2021 | Target | | | | | | Kondisi |
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan berbasis potensi lokal yang mandiri dan berdaya sang sesuai dengan tuntutan era industri 4.0 | Meningkatkan Ketersediaan Produksi Hewan | Nilai Konsumsi Ikan | Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan dan Perikanan | Jumlah Produksi Hasil Perikanan (Ton) | N/A | 107.275 | 107.275 | 110.483 | 113.808 | 117.222 | 120.739 | 120.739 |
| | | | | Jumlah Produksi Hasil Perikanan (Ton) | N/A | 116.186 | 116.186 | 119.672 | 123.262 | 126.960 | 130.768 | 130.768 |
| Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam untuk menjamin keseimbangan dan kelangsungan lingkungan hidup | Terwujudnya pengelolaan sumber daya perikanan dan perikanan yang berkelanjutan | Jumlah Pemanfaatan lahan untuk perikanan dan peternakan (Ha) | Meningkatnya Pengelolaan Lahan untuk perikanan dan peternakan | Jumlah Pemanfaatan Lahan Untuk Perikanan (Ha) | N/A | 0 | 40 Ha | 40 Ha | 40 Ha | 40 Ha | 40 Ha | 40 Ha |

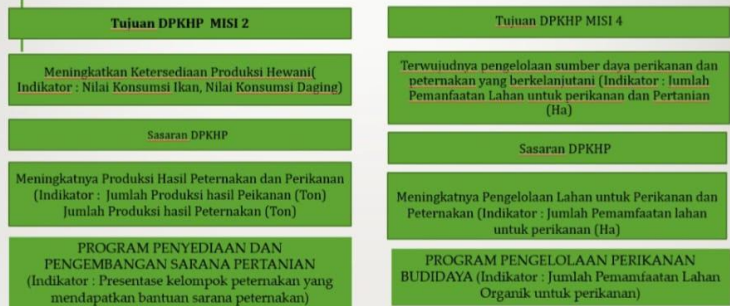
Sumber : Olahan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

II.2 CASCADING KINERJA

Gambar 2.2.1
LOGICAL FRAMEWORK Pemerintah Kabupaten Cianjur



Gambar 2.21.2
CASCADING KINERJA DPKHP

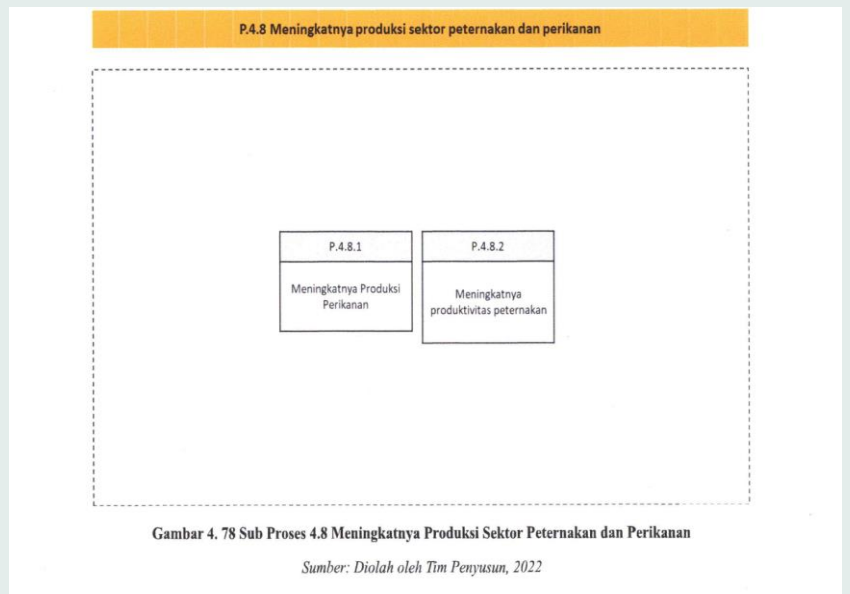


| | |
|---|--|
| MISI 2 : MENGEMBANGKAN EKONOMI KERAKYATAN DAN BERBASIS POTENSI LOKAL YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING SESUAI DENGAN TUNTUTAN ERA INDUSTRI 4.0 | MISI 4 : PENINGKATAN PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MENJAMIN KESEIMBANGAN DAN KELANGSUNGAN LINGKUNGAN HIDUP |
| Tujuan RPJMD Meningkatnya Perekonomian Daerah | Tujuan RPJMD Terwujudnya pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam yang berkelanjutan |
| Sasaran RPJMD Meningkatnya PDRB sektor Pertanian | Sasaran RPJMD Terpenuhinya kebutuhan lahan pertanian untuk masyarakat secara berkelanjutan |
| Tujuan Renstra Meningkatkan Ketersediaan Produk Hewani | Tujuan Renstra Terwujudnya pengelolaan sumber daya perikanan dan peternakan yang berkelanjutan |
| Sasaran Renstra Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan dan Perikanan | Sasaran Renstra Meningkatnya Pengelolaan Lahan untuk perikanan dan peternakan |

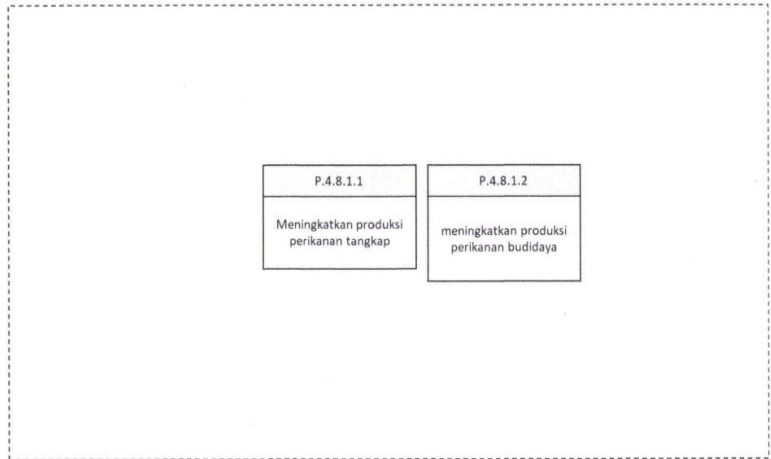
II.3 PETA PROSES BISNIS

Gambar 2.3.1

Peta Proses Bisnis Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan



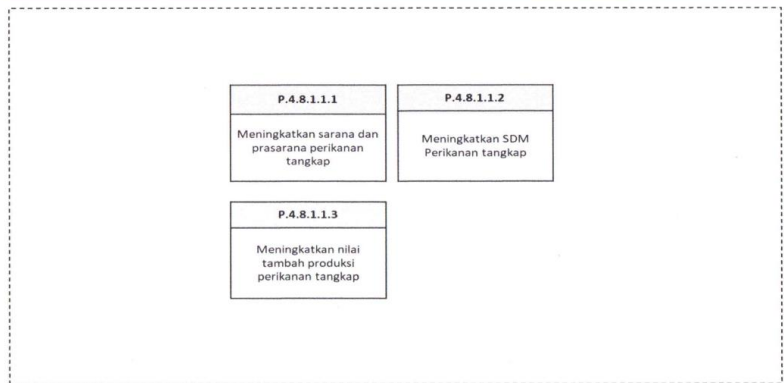
P.4.8.1 Meningkatnya Produksi Perikanan



Gambar 4. 79 Sub Proses 4.8.1 Meningkatnya Produksi Perikanan

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun, 2022

P.4.8.1.1 Meningkatkan produksi perikanan tangkap

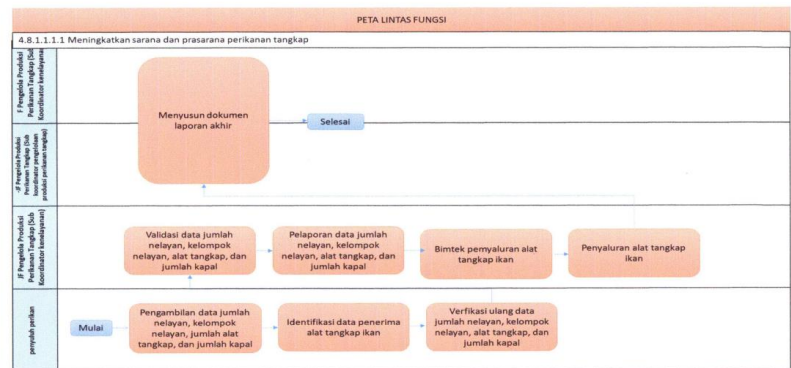


Gambar 4. 80 Sub Proses 4.8.1.1 Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun, 2022

Gambar 2.3 2

Peta Lintas Fungsi Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan



Gambar 4. 81 Peta Lintas Fungsi 4.8.1.1.1.1 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun, 2022

II.4 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan kontrak kerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan penetapan kinerja ini dimulai dengan merumuskan Renstra (Rencana Strategis) yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan Renstra tersebut ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Berdasarkan Rencana Kerja tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut. Selanjutnya Rencana Kerja tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan.

Dalam tahun berjalan, pelaksanaan kontrak kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi perangkat daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan yang biasa disebut dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dibawah ini adalah tolak ukur

pembuatan LKIP yaitu Penetapan Kinerja yang tercantum pada tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur Tahun 2022

 **PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**
DINAS PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
Jln. Pangeran Hidayatullah No. 154 Cianjur 43212 Telp. (0263) 2283163
Website : dislutkanak.cianjurkab.go.id | Email : dislutkanak@cianjurkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : AHMAD RIFA'I AZHARI, S.Sos, M.Si
JABATAN : KEPALA DINAS PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

NAMA : H. HERMAN SUHERMAN, S.T, M.AP
JABATAN : BUPATI

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cianjur, 28 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,

H. HERMAN SUHERMAN, S.T, M.AP.

PIHAK KESATU,

AHMAD RIFA'I AZHARI, S.Sos, M.Si
NIP. 196801021996031003

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022
KEPALA DINAS PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN CIANJUR**

| NO | SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA SASARAN | TARGET |
|----|--|-----|---|-------------|
| 1. | Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan dan Perikanan | 1.1 | Jumlah Produksi Hasil Perikanan | 107.275 Ton |
| | | 1.2 | Jumlah Produksi Hasil Peternakan | 116.186 Ton |
| 2. | Meningkatnya Pengelolaan Lahan untuk Perikanan dan Peternakan | 2.1 | Jumlah Pemanfaatan Lahan untuk Perikanan | 40 Ha |
| 3. | Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Perkantoran Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan | 3.1 | Persentase Pengelolaan Manajemen Perkantoran Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan | 100% |

| NO | PROGRAM | | ANGGARAN | KETERANGAN |
|--------------------------|---|------------|--------------------------|-------------------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. | 12.233.865.740,00 | SUMBER DANA APBD |
| 2. | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Rp. | 1.286.009.200,00 | SUMBER DANA APBD & APBN |
| 3. | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Rp. | 3.350.831.550,00 | SUMBER DANA APBD & APBN |
| 4. | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Rp. | 723.470.000,00 | SUMBER DANA APBD & APBN |
| 5. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Rp. | 1.443.000.000,00 | SUMBER DANA APBD & APBN |
| 6. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Rp. | 583.000.000,00 | SUMBER DANA APBD |
| 7. | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Rp. | 670.000.000,00 | SUMBER DANA APBD & APBN |
| 8. | Program Penyuluhan Pertanian | Rp. | 173.516.550,00 | SUMBER DANA APBD |
| Jumlah Anggaran : | | RP. | 20.463.693.040,00 | |

Cianjur, 28 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,

H. HERMAN SUHERMAN, S.T, M.AP.

PIHAK KESATU,

AHMAD RIFA'I AZHARI, S.Sos, M.Si
 NIP. 196801021996031003

II.5 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022

Untuk mencapai kinerja Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan tersebut, rencana kerja tahun 2022 dilakukan melalui 7 program belanja langsung urusan dan 1 program belanja langsung non urusan yang disajikan pada tabel 2.2. Anggaran yang disajikan adalah perubahan

Tabel 2.5

Rencana Anggaran dan Realisasi Berdasarkan Sasaran Strategis

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Anggaran | | |
|----|---|---|------------------|------------------|-----------|
| | | | Pagu | Realisasi | % |
| | | | | | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan dan Perikanan | Jumlah Produksi Hasil Perikanan (Ton) | Rp 4.912.310.750 | Rp 4.649.721.676 | 94,65 |
| | | Jumlah Produksi Hasil Peternakan (Ton) | Rp 2.836.517.420 | Rp 2.815.914.578 | 99,27 |
| 2 | Meningkatnya Pengelolaan Lahan untuk perikanan dan peternakan | Jumlah Pemanfaatan Lahan Untuk Perikanan (Ha) | Rp 448.000.000 | Rp 448.000.000 | 100 |

Sumber : olahan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

BAB III
CAPAIAN
KINERJA

III.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022

Capaian kinerja Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur tercermin dari capaian 1 Sasaran Strategis Renstra dan 1 Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja tersebut merupakan buah dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur pada Tahun 2022 rata-rata sebesar 100%.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah Daerah dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu, pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengukuran kinerja terhadap tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur memuat gambaran perwujudan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi setiap indikator sasaran strategis dengan target kinerja untuk mengetahui tingkat capaian atau selisih kinerja (Performance Gap). Tingkat capaian atau selisih kinerja tersebut menjadi acuan dalam penetapan kebijakan perencanaan tahunan untuk peningkatan pencapaian kinerja di masa yang akan datang (Performance Improvement).

Berikut ini diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja per sasaran strategis

SASARAN 1 :

MENINGKATNYA PRODUKSI HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Sasaran strategis ini memberikan gambaran usaha yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan dalam mendorong tercapainya produksi perikanan dan peternakan di Kabupaten Cianjur dengan menggunakan segala potensi yang dimiliki Kabupaten Cianjur pada sektor

kelautan dan perikanan. **Sasaran Strategis yang pertama ini mempunyai dua indikator sasaran (IKU) yaitu :**

- 1. Jumlah Produksi Hasil perikanan (Ton)**
- 2. Jumlah Produksi Hasil Peternakan (Ton)**

1. JUMLAH PRODUKSI HASIL PERIKANAN

Indikator sasaran yang pertama menggambarkan jumlah Produksi Hasil perikanan yang ada di Kabupaten Cianjur selama tahun 2022 baik yang berasal dari hasil tangkapan nelayan laut, maupun nelayan perairan umum daratan dan dari hasil budidaya ikan baik yang diusahakan secara komersil maupun yang dikelola oleh masyarakat umum Realisasi Jumlah Produksi Hasil Perikanan pada tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Jumlah Produksi Hasil Perikanan Tahun 2022

| Indikator Sasaran | Realisasi 2021 | Target 2022 | Realisasi 2022 | % Capaian |
|---------------------------------|----------------|-------------|----------------|-----------|
| Jumlah Produksi Hasil Perikanan | 125.643 ton | 107.275 ton | 126.973,38 ton | 118,36 % |

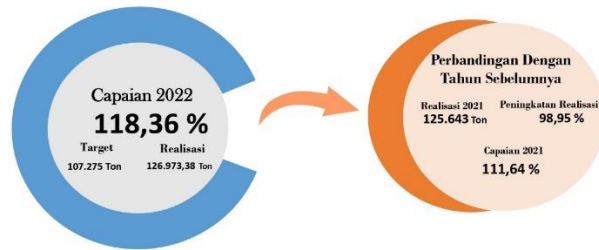
Sumber : Bidang Perikanan Tangkap dan budidaya

Pada tahun 2022 realisasi jumlah produksi hasil perikanan mencapai angka 126.973,38 dari target 107.275 atau dengan capaian 118,36 %. Realisasi ini diperoleh dengan cara menghitung jumlah hasil produksi hasil perikanan tangkap 1.598,38 Ton dan produksi hasil perikanan budidaya 125.375 Ton.

SASARAN 1

Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan dan Perikanan

1. Jumlah Produksi Hasil Perikanan



2. JUMLAH PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

Indikator sasaran yang kedua adalah Jumlah Produksi Hasil peternakan (Ton). Indikator ini memberikan gambaran tercapainya target produksi hasil peternakan baik yang diproduksi oleh masyarakat maupun pihak swasta. Produksi hasil peternakan terdiri dari produksi daging, produksi telur dan produksi susu, data ini berasal dari Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dimana bidang teknis secara berjenjang memperoleh data ini dari UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) yang ada di 3 Wilayah yaitu, Utara, Tengah, Selatan, UPTD Rumah Potong Hewan, Koperasi Peternakan dan Perusahaan-perusahaan Peternakan yang ada di Kabupaten Cianjur. Capaian realisasi untuk indikator peningkatan produksi hasil peternakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Realisasi Indikator Jumlah Produksi Hasil Peternakan (Ton)
Tahun 2022

| Indikator Sasaran | Realisasi 2021 | Target 2022 | Realisasi 2022 | Capaian 2022 |
|--|----------------|-------------|----------------|--------------|
| Jumlah Produksi Hasil Peternakan (Ton) | 125.781 ton | 116.186 ton | 127.309 ton | 109,57 % |

Sumber : Bidang Peternakan

Realisasi capaian ini diperoleh dengan rumus perhitungan jumlah produksi hasil peternakan tahun 2022 dikurangi jumlah produksi hasil peternakan tahun 2021 kemudian dibagi dengan jumlah produksi hasil peternakan tahun 2021. Jumlah Produksi hasil peternakan diperoleh dari produksi telur dimana pada tahun 2022 sebesar 55,159 ton sedangkan untuk produksidaging sebesar 67.693 ton dan produksi susu sebesar 4.455 ton.

Gambar 3.3



SASARAN 2 :

MENINGKATNYA PENGELOLAAN LAHAN UNTUK PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Sasaran strategis ini memberikan gambaran usaha yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan dalam mendorong salah satu dari 5 program unggulan dalam pemerintahan Bupati Cianjur periode 2021-2026 yaitu peningkatan produktifitas 1.000 Hektar lahan pertanian di Kabupaten Cianjur yang berkolaborasi dengan Dinas Pertanian, Perkebunan Pangan dan Holtikultura Kabupaten Cianjur dengan kegiatan Minapadi. **Sasaran Strategis yang kedua ini mempunyai satu indikator sasaran (IKU) yaitu :**

1. JUMLAH PEMENFAATAN LAHAN UNTUK PERIKANAN

(Ha)

Indikator sasaran yang kedua menggambarkan jumlah Produksi pemamfaatan lahan untuk perikanan yang ada di Kabupaten Cianjur selama tahun 2022

Tabel
Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Jumlah Pemanfaatan Lahan Untuk Perikanan Tahun 2022

| Indikator Sasaran | Realisasi 2021 | Target 2022 | Realisasi 2022 | % Capaian |
|---|----------------|-------------|----------------|-----------|
| Jumlah Pemanfaatan Lahan Untuk Perikanan (Ha) | 0 | 40 Ha | 40 Ha | 100 |

Sumber : Bidang Perikanan budiddaya

Realisasi capaian ini diperoleh dengan rumus perhitungan jumlah Pemamfaatan lahan untuk perikanan tahun 2022, karena tahun 2022 merupakan tahun pertama untuk kegiatan minapadi sehingga tidak bisa disandingkan dengan tahun sebelumnya.

Gambar 3.3



III.2 REALISASI ANGGARAN

Kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui pendekatan anggaran berbasis program (money follow program), dimana

pendekatan sistem penganggaran lebih difokuskan kepada program/kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Pada pendekatan money follow program ini outcome dari program/kegiatan menjadi fokus utama untuk direalisasikan, berdasarkan input dan output yang telah direncanakan.

Untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan, pada tahun 2022 Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan melaksanakan 7 (tujuh) program Total anggaran yang dikelola beserta realisasinya disajikan pada tabel 3.2.1 dibawah ini :

Tabel 3.2.1

Tabel 3.2.1 Realisasi Kinerja dan Anggaran

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Kinerja | | | Nama Program | Keuangan | | |
|----|---|---|---------|------------|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | Target | Realisasi | % Realisasi | | Pagu | Realisasi | % Realisasi |
| 1 | | Jumlah Produksi Hasil Perikanan (Ton) | 107.275 | 126.973,38 | 118,36 % | Program Pengelolaan Perikanan Tawanan | Rp. 1.286.009.200 | Rp. 1.269.040.640 | 98,68 |
| | | | | | | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Rp. 2.260.361.000 | Rp. 2.106.220.058 | 93,18 |
| | | | | | | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Rp. 723.470.000 | Rp. 718.236.428 | 99,23 |
| | Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan dan Perikanan | Jumlah Produksi Hasil Peternakan (Ton) | 116.186 | 127.308,59 | 109,57 % | Program Penyediaan dan Peningkatan Sarana Pertanian | Rp. 1.443.000.000 | Rp. 1.429.507.385 | 99,06 |
| | | | | | | Program Penyediaan dan Peningkatan Prasarana Pertanian | Rp. 583.000.000 | Rp. 578.353.536 | 99,20 |
| | | | | | | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Rp. 670.000.000 | Rp. 634.582.467 | 94,71 |
| | | | | | | Program Penyuluhan Pertanian | Rp. 173.516.550 | Rp. 173.471.190 | 99,97 |
| | Meningkatnya Pengelolaan Lahan untuk perikanan dan peternakan | Jumlah Pemanfaatan Lahan Untuk Perikanan (Ha) | 40 | 40 | 100 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Rp. 1.090.470.550 | Rp. 1.004.224.550 | 92,09 |

Sumber : Olahan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

III.3 ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN

Efisiensi anggaran Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur pada akhir tahun 2022 yang dialokasikan untuk BTT (penanganan dampak bencana gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur pada 21 November 2022) yaitu sebesar 102.260.000

III.4 PENGHARGAAN / PRESTASI TAHUN 2022

Pada tahun 2022 Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur mendapatkan penghargaan dari Kepala Karantina Kelas II Cilegon karena Telah Bersinergi dalam upaya penanganan dan pencegahan penyakit rabies terhadap Hewan Pembawa Rabies (HRP) yang dilalulintaskan melalui Pelabuhan Penyeberangan Merak.

Gambar 3.4.1
Sertifikat Penghargaan Tahun 2022



BAB IV

PENUTUP

IV. PENUTUP

LKIP Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan tahun 2022. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis Renstra dan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Tahun 2022.

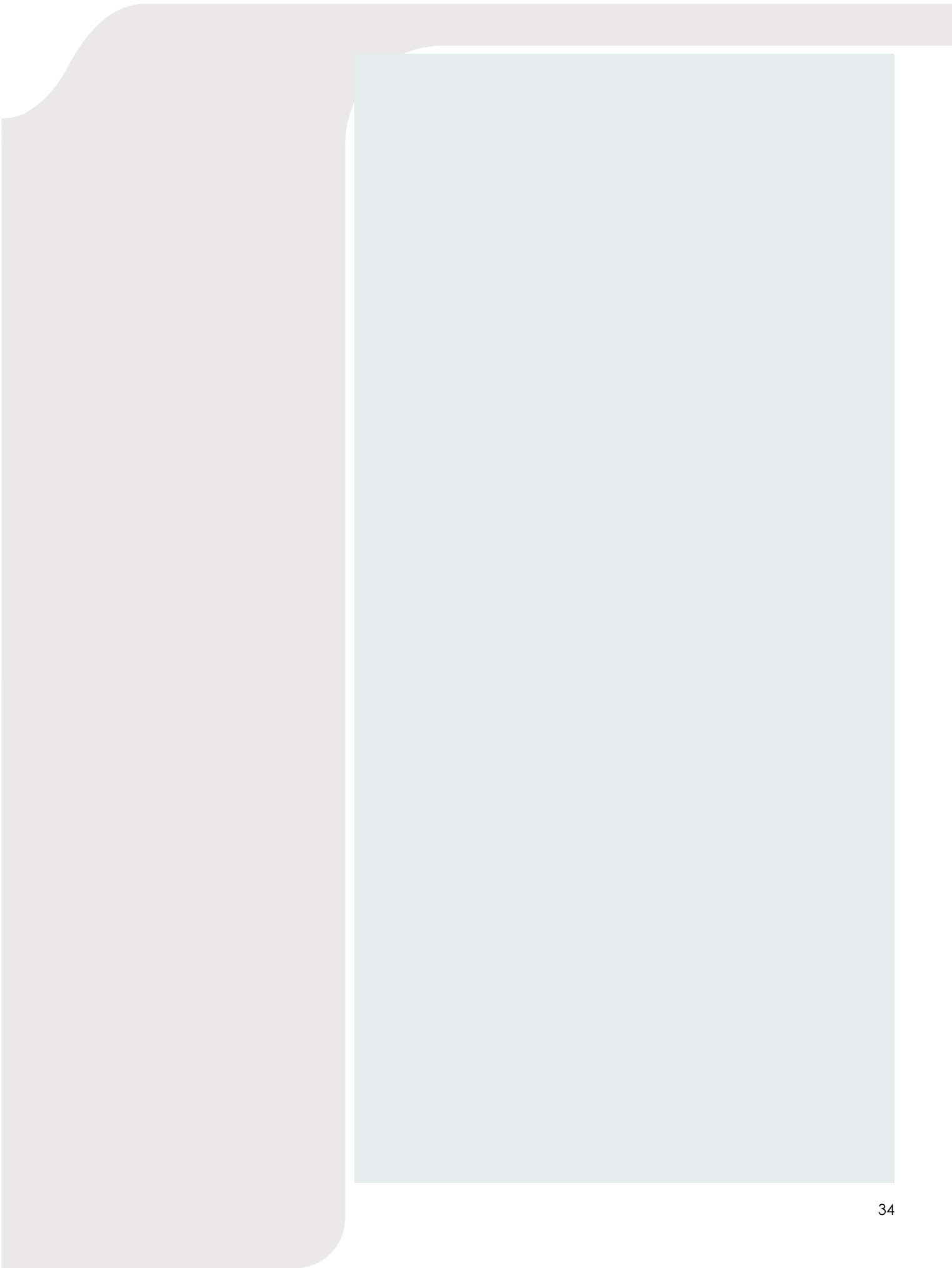
Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur Tahun 2022 berhasil mencapai kinerja dengan sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Renstra sebesar 106,95%. Dari 3 IKU, sebanyak 99 berhasil melampaui target kinerja dengan faktor pendorong keberhasilan antara lain tingginya komitmen dan kolaborasi.

Sebagian sasaran strategis RPJMD belum mencapai kinerja sesuai dengan harapan yang ditandai oleh 5 target IKU yang tidak tercapai. Pertama adalah 'Persentase penurunan penduduk miskin' yang didorong oleh pemenuhan kebutuhan dasar sosial, kesehatan, dan pendidikan yang belum optimal. Selanjutnya adalah 'Tingkat upaya penurunan emisi gas rumah kaca' yang didorong oleh dukungan infrastruktur persampahan domestik yang belum memenuhi. Lalu, 'Nilai Tukar Petani' yang didorong oleh inflasi, 'Kontribusi pariwisata terhadap PDRB' yang didorong oleh menurunnya kunjungan wisatawan, serta 'Laju pertumbuhan sector perdagangan' yang didorong oleh menurunnya daya beli masyarakat.

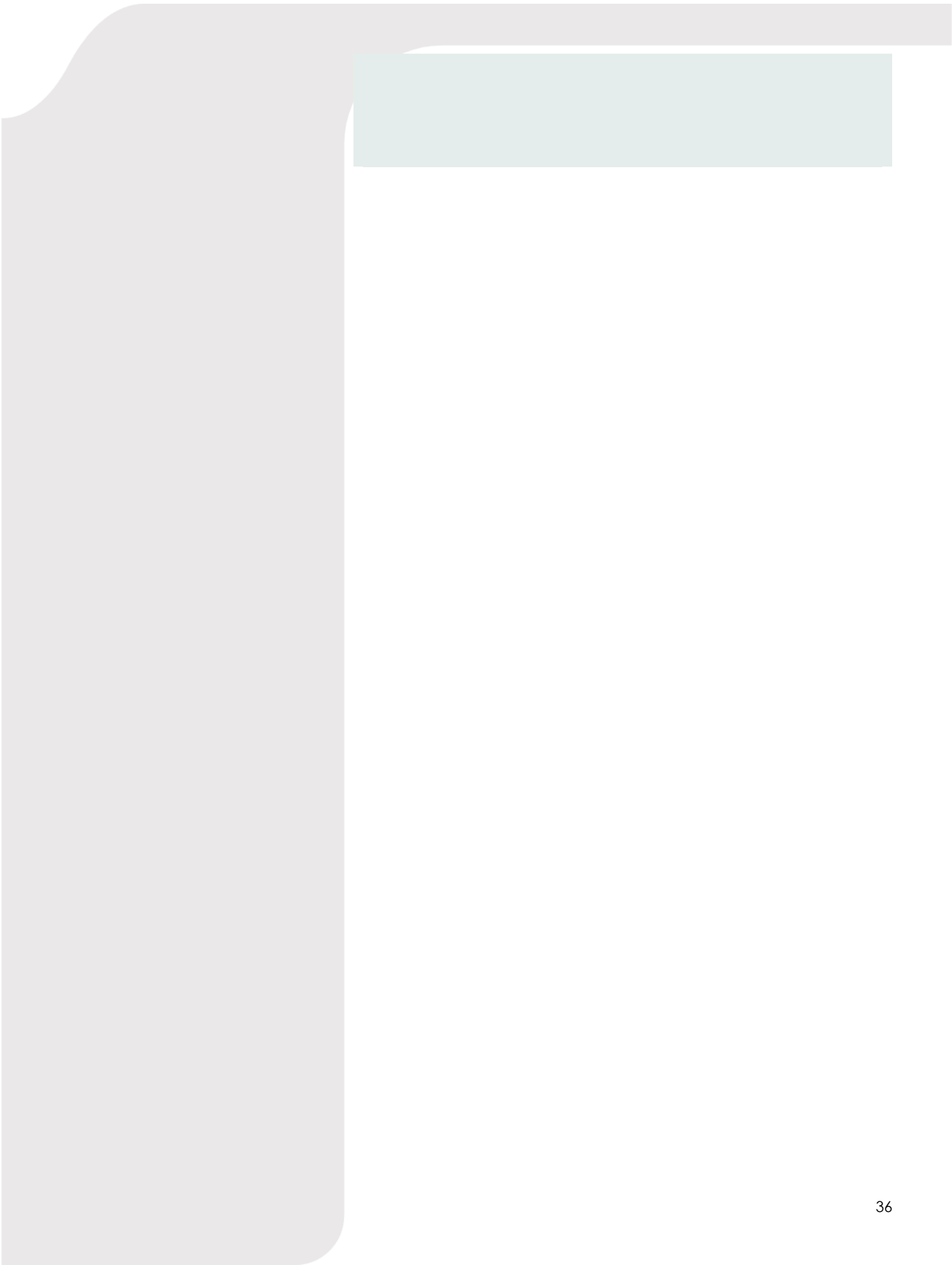
Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur Tahun 2022 berhasil menggunakan sumber daya sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran

strategis pada tahun 2021 sebesar Rp31.182.289.302.838,00 dengan efisiensi sebesar 5,88% atau senilai Rp1.949.532.229.208,00.

Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui berbagai inisiatif strategis. Semoga akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat semakin meningkat sehingga bisa mencapai pemerintahan yang kapabel, bersih dan akuntabel yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik



LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN

Jl. Pangeran Hidayatullah No. 154 Cianjur Telp (0263- 2283163)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 523.1/ 165 /DPKHP/2023

TENTANG :

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur Tahun 2023, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur 2021 – 2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 91 tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- Kedua** Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan bulan Desember tahun 2023 dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI: CIANJUR
PADA TANGGAL: Januari 2023

KEPALA,

AHMAD RIFA' AZHARI, S.Sos, M.Si
NIP. 19980702 199603 1 003

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN KABUPATEN CIANJUR**

Nomor : : 523.1 / 165 /DPKHP /2023
Tanggal :
Tentang : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Daerah Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur Tahun 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI DAERAH DINAS PETERNAKAN
KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023**

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN |
|------------|--|------------------|
| 1. | Kepala Dinas | Penanggung Jawab |
| 2. | Sekretaris | Ketua |
| 3. | JF Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan) | Anggota |
| 4. | Kepala Bidang Peternakan | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Kesehatan Hewan | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Perikanan Budidaya | Anggota |
| 7. | Kepala Bidang Perikanan Tangkap | Anggota |
| 8. | JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda (Sub Koordinator Produksi Peternakan) | Anggota |
| 9. | JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda (Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Peternakan) | Anggota |
| 10. | JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda (Sub Koordinator Pengembangan Usaha peternakan) | Anggota |
| 11. | JF Medik Veteriner Ahli Muda (Sub Koordinator Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan) | Anggota |
| 12. | JF Medik Veteriner Ahli Muda (Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Hewan dan Obat Hewan) | Anggota |
| 13. | JF Medik Veteriner Ahli Muda (Sub Koordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner) | Anggota |
| 14. | JF Analis Akuakultur Ahli Muda (Sub Koordinator Produksi Perikanan Budidaya) | Anggota |
| 15. | JF Analis Akuakultur Ahli Muda (Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya) | Anggota |

| | | |
|-----|---|---------|
| 16. | JF Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda (Sub Koordinator Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan budidaya) | Anggota |
| 17. | JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda (Sub Koordinator Pengelolaan Produksi Perikanan Tangkap) | Anggota |
| 18. | JF (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda Sub Koordinator Kenelayanan) | Anggota |
| 19. | JF Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda (Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tangkap) | Anggota |
| 20. | JF Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sub Koordinator Keuangan) | Anggota |
| 21. | Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian | Anggota |

KEPALA,



AHMAD RIFA'I AZHARI, S.Sos, M.Si
NIP. 19680102 199603 1 003

LAMPIRAN 2 :

**RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2023**

1. PENANGGUNG JAWAB :

- Bertanggungjawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Tahun 2023;
- Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Tahun 2023;
- Bertanggung jawab sesuai tugas yang ditetapkan

2. KETUA :

- Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Tahun 2023;
- Membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Tahun 2023;
- Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Tahun 2023;
- Bertanggung jawab sesuai tugas yang ditetapkan.

3. ANGGOTA :

- Mereview Hasil Evaluasi Pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan Tahun 2023;
- Melakukan Analisis Terhadap Pencapaian Dan Perencanaan Kinerja Program/ Kegiatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan Tahun 2023;
- Melakukan Telaahan Terhadap Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan ;
- Melakukan Telaahan Terhadap Rancangan Awal Rkpd Tahun 2023;
- Merumuskan Tujuan, Sasaran Dan Program Kegiatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan Tahun 2023;
- Merumuskan Kegiatan Prioritas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan Tahun 2023;
- Menampung Hasil Telaahan , Koreksi Dan Masukan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahbidangnya Masing – Masing Pada Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan;
- Melakukan Penyempurnaan Atas Hasil Telaahan , Koreksi Dan Masukan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahbidangnya Masing – Masing Pada Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan;
- Menyesuaikan Dokumen Rancangan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahdinas Peternakan Kesehatan Hewan Dan Perikanan Tahun 2023 Dengan Dokumen Rkpd Tahun 2023 Yang Telah Ditetapkan;
- Bertanggung jawab sesuai tugas yang ditetapkan.

KEPALA,

AHMAD RIFA' AZHARI, S.Sos, M.Si
NIP. / 19680102 199603 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN

Jln. Pangeran Hidayatullah No. 154 Cianjur 43212 Telp. (0263) 2283163
Website : dislutkanak.cianjurkab.go.id | Email : dislutkanak@cianjurkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : AHMAD RIFA'I AZHARI, S.Sos, M.Si
JABATAN : KEPALA DINAS PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

NAMA : H. HERMAN SUHERMAN, S.T, M.AP
JABATAN : BUPATI

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cianjur, 28 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,

H. HERMAN SUHERMAN, S.T, M.AP.

PIHAK KESATU,

AHMAD RIFA'I AZHARI, S.Sos, M.Si
NIP. 196801021996031003

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022
KEPALA DINAS PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN CIANJUR**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN | | TARGET |
|-----------|--|----------------------------------|---|---------------|
| 1. | Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan dan Perikanan | 1.1 | Jumlah Produksi Hasil Perikanan | 107.275 Ton |
| | | 1.2 | Jumlah Produksi Hasil Peternakan | 116.186 Ton |
| 2. | Meningkatnya Pengelolaan Lahan untuk Perikanan dan Peternakan | 2.1 | Jumlah Pemanfaatan Lahan untuk Perikanan | 40 Ha |
| 3. | Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Perkantoran Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan | 3.1 | Persentase Pengelolaan Manajemen Perkantoran Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan | 100% |

| NO | PROGRAM | ANGGARAN | | KETERANGAN |
|--------------------------|---|------------|--------------------------|-------------------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. | 12.233.865.740,00 | SUMBER DANA APBD |
| 2. | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Rp. | 1.286.009.200,00 | SUMBER DANA APBD & APBN |
| 3. | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Rp. | 3.350.831.550,00 | SUMBER DANA APBD & APBN |
| 4. | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Rp. | 723.470.000,00 | SUMBER DANA APBD & APBN |
| 5. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Rp. | 1.443.000.000,00 | SUMBER DANA APBD & APBN |
| 6. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Rp. | 583.000.000,00 | SUMBER DANA APBD |
| 7. | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Rp. | 670.000.000,00 | SUMBER DANA APBD & APBN |
| 8. | Program Penyuluhan Pertanian | Rp. | 173.516.550,00 | SUMBER DANA APBD |
| Jumlah Anggaran : | | RP. | 20.463.693.040,00 | |

Cianjur, 28 Oktober 2022



PIHAK KESATU,

AHMAD RIFA'I AZHARI, S.Sos, M.Si
NIP. 196801021996031003



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS
PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN**
Jl. Pangeran Hidayatullah No. 154 Cianjur - 0263-2283163
www.dislutkanak.cianjurkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : 800 / 300 / DKPP / TAHUN 2023

TENTANG

**MEKANISME PENGUMPULAN DATA
KINERJA KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN CIANJUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Peternakan kesehatan hewan dan perikanan Kabupaten Cianjur Tahun 2022, maka diperlukan Mekanisme Pengumpulan Data Capaian Kinerja;
- b. bahwa dengan adanya Mekanisme Pengumpulan Data Capaian Kinerja maka pengumpulan data kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Peternakan kesehatan hewan dan perikanan Kabupaten Cianjur akan lebih terarah dengan hasil yang lebih akurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan kesehatan hewan dan perikanan Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Peternakan kesehatan hewan dan perikanan Kabupaten Cianjur tentang Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Peternakan kesehatan hewan dan perikanan Kabupaten Cianjur Tahun 2022.
- KESATU : Menetapkan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Peternakan kesehatan hewan dan perikanan Kabupaten Cianjur Tahun 2022;
- KEDUA : Data Kinerja yang dimaksud pada Diktum KESATU meliputi dokumen yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja yang ada dalam Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan kesehatan hewan dan perikanan Kabupaten Cianjur Tahun 2022;
- KETIGA : Mekanisme Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I serta Penanggung Jawab ketersediaan data capaian kinerja tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cianjur





Pada Tanggal : Januari 2023

**Kepala
Dinas Peternakan kesehatan hewan dan
perikanan Kabupaten Cianjur**



ANSALIRI AZHARI, S.Sos, M.Si

NIP. 19680 102 199603 1 003

| No. | KEGIATAN | PELAKSANA | | | | MUTU BAKU | | | Keterangan |
|-----|---|---|--|--------|-----------------|--|---------------|--|------------|
| | | Pelaksana | Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan | Sekdis | Kepala Dinas | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Pelaksana Penyusun Bahan Evaluasi Program dan Kegiatan mengumpulkan dan memilah data untuk bahan LKIP |  | | | | Data bidang | 6000 menit | Hasil Pengumpulan Data | |
| 2 | Pelaksana Penyusun Bahan Evaluasi Program dan Kegiatan membuat/ mengetik draft LKIP dan diserahkan kepada Kasubbag |  | | | | Hasil Pengumpulan Data | 300 menit | Pengetikan Draft LKIP | |
| 3 | Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan meneliti Draft LKIP, jika ada kesalahan dikembalikan ke Pelaksana, jika sudah benar di paraf dan diserahkan ke Sekretaris Dinas (Sekdis) | Tidak | | | | Draft LKIP diteliti | 60 menit | Draft LKIP diteliti | |
| 4 | Sekretaris Dinas meneliti Draft yang sudah di paraf oleh Kasubbag, jika ada kesalahan dikembalikan, jika sudah benar diparaf dan diserahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani | | | | | Draft LKIP diteliti | 60 menit | Draft LKIP siap untuk diparafkan | |
| 5 | Kepala Dinas meneliti Draft yang sudah diparaf oleh Sekretaris, jika ada kesalahan dikembalikan ke sekretaris, jika sudah benar ditandatangani dan diserahkan kepada Kasubag. | | | | | Draft LKIP siap untuk diparafkan | 30 menit | Draft LKIP yang sudah di Tanda Tangan | |
| 6 | Pelaksana Penyusun Bahan Evaluasi Program dan Kegiatan mendistribusikan LKIP ke Bappeda dan Inspektorat/ Instansi yang memerlukan |  | | | | Draft LKIP yang sudah di Tanda Tangan | 30 menit | Pengiriman Dokumen LKIP | |
| 7 | Pelaksana Penyusun Bahan Evaluasi Program dan Kegiatan mengarsipkan Dokumen LKIP |  | | | | Pengiriman Dokumen LKIP | 15 menit | Pengarsipan Dokumen LKIP | |

